



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKO PEKANBARU GEDUNG B.6 LANTAI 1
KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU - RIAU

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTIN MANOLUK, ST

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : AGUNG NUGROHO, S. E., M.M.

Jabatan : WALI KOTA PEKANBARU

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 05 Desember 2025

PIHAK KEDUA

WALIKOTA PEKANBARU

AGUNG NUGROHO

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

MARTIN MANOLUK, ST

Pembina(IV/a)
NIP. 197603182006041005

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak.	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	3,4%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	3,7%
		Persentase penyediaan rumah bagi korban bencana	100%
2	Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	16%
		Persentase Pelayanan Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	12%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai evaluasi AKIP OPD	BB
		Nilai IKM DPRKP	82.5

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 9.580.179.650	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 2.195.614.115	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 5.798.604.639	APBD
4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 614.228.630	APBD
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 160.938.048.827	APBD
6.	Program Peningkatan Pelayanan Setifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan	Rp. 1.924.000	APBD
TOTAL		Rp. 179.128.599.861	

Pekanbaru, 05 Desember 2025

PIHAK KEDUA

WALIKOTA PEKANBARU

AGUNG NUGROHO

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

MARTIN MANOLUK, ST

Pembina(IV/a)

NIP. 197603182006041005

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

INDIKATOR KINERJA

1. Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah sebagai peran tugas dan fungsi Dinas DPRKP dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang berfokus pada pengurangan luas kawasan kumuh dan pesentase peningkatan rumah layak huni .

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	Penurunan luasan permukiman kumuh berarti meningkatnya jumlah kawasan permukiman yang lebih layak huni. Semakin tinggi persentase penanganan, maka akan semakin dekat pencapaian terhadap kondisi permukiman yang layak	$(\text{Luas Kawasan kumuh ditangani} / \text{Total luas kawasan kumuh}) \times 100\%$	Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Semakin tinggi cakupan ketersediaan rumah layak huni, semakin besar pula jumlah keluarga yang tinggal di hunian yang sesuai standar kelayakan. Hal ini mencerminkan terwujudnya kondisi permukiman yang layak secara menyeluruh	$(\text{Jumlah RTLH ditangani} / \text{Total RTLH}) \times 100\%$	Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim
3	Persentase penyediaan rumah bagi korban bencana	Dengan terpenuhinya kebutuhan hunian pascabencana, masyarakat dapat kembali tinggal di lingkungan yang aman, sehat, dan tertata	$(\text{Jumlah rumah yang ditangani} / \text{Total rumah rusak akibat bencana}) \times 100\%$	Bidang Perumahan Dinas Perkim

TARGET KINERJA

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	3,4%	Berdasarkan SK Kumuh No 519 Tahun 2024 luas kawasan kumuh kewenangan kota adalah 178.02 Ha. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan OPD untuk penanganan luas kawasan kumuh dalam periode satu tahun adalah 6 Ha maka diperoleh target untuk PK Kepala Dinas untuk Tahun 2025 adalah 3.4%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	3,7%	Berdasarkan Database Bidang Kawasan Permukiman terdapat 1.350 Unit RTLH di Kota Pekanbaru, dimana untuk periode tahun 2025 Dinas Perkim mempunyai target pembangunan rumah layak huni sejumlah 50 Unit, sehingga target PK Kepala Dinas untuk Tahun 2025 adalah 3.7%
Persentase penyediaan rumah bagi korban bencana	100%	Berdasarkan amanat SPM bahwa realisasi untuk bantuan rumah layak huni bagi korban bencana adalah 100%, maka target PK Kepala Dinas untuk Tahun 2025 adalah 100%

2. Tersedianya Prasarana Dasar Perumahan Dan Permukiman Yang Berkualitas Dan Merata

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kawasan perumahan dan permukiman dilengkapi dengan prasarana dasar yang memadai, seperti jalan lingkungan, drainase, sistem air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Ketersediaan prasarana dasar tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung terciptanya lingkungan hunian yang sehat, aman, dan nyaman.

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indicator yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antar lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Indikator ini mencerminkan ketersediaan fasilitas pendukung (seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka) yang menjadi syarat hunian layak, sekaligus menjamin pemerataan kualitas infrastruktur permukiman	$\left(\frac{\text{Jumlah satuan perumahan dilengkapi PSU}}{\text{Jumlah total perumahan}} \right) \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perkim
2	Persentase Pelayanan Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan	Indikator ini mencerminkan dukungan pemerintah dalam memastikan proses perencanaan teknis hunian dan PSU	$\left(\frac{\text{Jumlah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah}}{\text{Jumlah total perancangan dan perencanaan rumah}} \right) \times 100\%$	Bidang Perumahan Dinas Perkim

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	Rumah Serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	dilakukan sesuai standar sehingga menghasilkan prasarana yang layak, berkualitas, serta merata di seluruh kawasan perumahan dan permukiman	serta perencanaan PSU yang dikeluarkan pada tahun n/Jumlah yang mengajukan) x 100%	

TARGET KINERJA

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	16%	Berdasarkan data perencanaan yang disusun di awal tahun periode penyusunan renstra, disebutkan bahwa jumlah perumahan ada 1.500 lokasi dimana untuk tahun 2025 di rencanakan akan dilakukan pembangunan PSU di 240 Lokasi perumahan, sehingga target PKKepala Dinas untuk Tahun 2025 adalah 16%
Persentase Pelayanan Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	12%	Untuk kegiatan penerbitan sertifikat bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di rencanakan 6 sertifikat dikeluarkan di tahun 2025 dari total 50 berkas usulan yang diterima dari orang/pengembang. Sehingga target PK Kepala Dinas untuk Tahun 2025 adalah 12%

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel

Sasaran kinerja diatas menuntut adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu, indikator kinerja yang dipilih harus mampu menunjukkan sejauh mana praktik transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah terlaksana

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yang akandiwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai evaluasi AKIP OPD	Indeks Evaluasi AKIP menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan berbasis kinerja, melaksanakan program sesuai sasaran, dan mempertanggungjawabkannya secara transparan	LHE Internal dari Inspektorat	INSPEKTORAT

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
2	Nilai IKM DPRKP	IKM merupakan indikator langsung dari kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Transparansi prosedur layanan, keterbukaan informasi, serta kejelasan biaya/standar pelayanan menjadi faktor penting dalam penilaian IKM	Survey IKM dari Surveyor	SEKRETARIAT DAERAH

TARGET KINERJA

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai evaluasi AKIP OPD	BB	Berdasarkan hasil LHE Inspektorat No. B.700/INSPEKTORAT-IRBANI/3/2025 Hasil evaluasi internal untuk Dinas Perkim adalah B, sehingga untuk tahun 2025 di targetkan dalam PK Kepala Dinas menjadi BB
Nilai IKM DPRKP	82.5	Berdasarkan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah pada bulan juli 2024, nilai IKM Dinas Perkim adalah 81.97, sehingga untuk tahun 2025 di targetkan dalam PK Kepala Dinas naik menjadi 82.5



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKO PEKANBARU GEDUNG B.6 LANTAI 1
KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU - RIAU

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TENGKU AHMED REZA PAHLEVI, S.AP., M.Si.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : MARTIN MANOLUK, ST

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 05 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

MARTIN MANOLUK, ST
Pembina(IV/a)
NIP. 197603182006041005

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

TENGKU AHMED REZA PAHLEVI, S.AP., M. Si
Pembina(IV/a)
NIP. 197511102001121010

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai evaluasi AKIP OPD	BB
		Nilai IKM DPRKP	82.5

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.926.330	APBD P
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.513.313.024	APBD P
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 3.900.000	APBD P
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 0	APBD P
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 881.674.570	APBD P
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 376.595.618	APBD P
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.168.330.108	APBD P
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 628.440.000	APBD P
TOTAL		Rp. 9.580.179.650	

Pekanbaru, 05 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU



MARTIN MANOLUK, ST
Pembina(IV/a)
NIP. 197603182006041005

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU



TENGKU AHMED REZA PAHLEVI, S.AP., M. Si
Pembina(IV/a)
NIP. 197511102001121010

Perjanjian Kinerja diatas menuntut adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu, indikator kinerja yang dipilih harus mampu menunjukkan sejauh mana praktik transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah terlaksana

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yang akandiwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai evaluasi AKIP OPD	Indeks Evaluasi AKIP menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan berbasis kinerja, melaksanakan program sesuai sasaran, dan mempertanggungjawabkannya secara transparan	LHE Internal dari Inspektorat	INSPEKTORAT
2	Nilai IKM DPRKP	IKM merupakan indikator langsung dari kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Transparansi prosedur layanan, keterbukaan informasi, serta kejelasan biaya/standar pelayanan menjadi faktor penting dalam penilaian IKM	Survey IKM dari Surveyor	SEKRETARIAT DAERAH

TARGET KINERJA

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai evaluasi AKIP OPD	BB	Berdasarkan hasil LHE Inspektorat No. B.700/INSPEKTORAT-IRBANI/3/2025 Hasil evaluasi internal untuk Dinas Perkim adalah B, sehingga untuk tahun 2025 di targetkan dalam PK Kepala Dinas menjadi BB
Nilai IKM DPRKP	82.5	Berdasarkan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah pada bulan juli 2024, nilai IKM Dinas Perkim adalah 81.97, sehingga untuk tahun 2025 di targetkan dalam PK Kepla Dinas naik menjadi 82.5



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKO PEKANBARU GEDUNG B.6 LANTAI 1
KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU - RIAU

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN PERMATA INDAH , SE

Jabatan : KEPALA BIDANG PERUMAHAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : MARTIN MANOLUK, ST

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 05 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

MARTIN MANOLUK, ST
Pembina(IV/a)
NIP. 197603182006041005

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

DIAN PERMATA INDAH, SE
Penata Muda Tk. I (IId)
NIP. 197907062009022003

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak.	Persentase penyediaan rumah bagi korban bencana	100%
2	Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase Pelayanan Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	12%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Program Pengembangan Perumahan		
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Rp 74.407.250	APBD P
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Rp 139.179.750	APBD P
4	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp 755.588.115	APBD P
5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 1.226.439.000	APBD P
6	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Rp	APBD P
TOTAL		Rp 2.195.614.115	

Pekanbaru, 05 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU



MARTIN MANOLUK, ST
Pembina(IV/a)
NIP. 197603182006041005

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU



DIAN PERMATA INDAH, SE
Penata Muda Tk. I (IId)
NIP. 197907062009022003

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

INDIKATOR KINERJA

1. Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak

Dalam rangka mendukung kinerja Kepala Dinas untuk Sasaran Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak berikut berikut indikator kinerja Kepala Bidang Perumahan :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
3	Persentase penyediaan rumah bagi korban bencana	Dengan terpenuhinya kebutuhan hunian pascabencana, masyarakat dapat kembali tinggal di lingkungan yang aman, sehat, dan tertata	$(\text{Jumlah rumah yang ditangani} / \text{Total rumah rusak akibat bencana}) \times 100\%$	Bidang Perumahan Dinas Perkim

TARGET KINERJA

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penyediaan rumah bagi korban bencana	100%	Berdasarkan amanat SPM bahwa realisasi untuk bantuan rumah layak huni bagi korban bencana adalah 100%, maka target PK Kepala Dinas untuk Tahun 2025 adalah 100%



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKO PEKANBARU GEDUNG B.6 LANTAI 1
KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU - RIAU

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTIN MANOLUK, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : MARTIN MANOLUK, ST

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 05 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

MARTIN MANOLUK, ST
Pembina(IV/a)
NIP. 197603182006041005

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PSU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

MARTIN MANOLUK, ST
Pembina(IV/a)
NIP. 197603182006041005

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	16%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp. 160.938.048.827	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp. 2.821.490.725	APBD P
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp. 108.203.115.096	APBD P
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp. 1.214.473.040	APBD P
	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Rp. 9.400.000	APBD P
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp. 1.625.407.826	APBD P
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Rp. 46.506.141.000	APBD P
	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Rp. 3.775.540	APBD P
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp. 554.245.600	APBD P
TOTAL		Rp. 160.938.048.827	

Pekanbaru, 05 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU



MARTIN MANOLUK, ST
Pembina(IV/a)
NIP. 197603182006041005

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PSU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU



MARTIN MANOLUK, ST
Pembina(IV/a)
NIP. 197603182006041005

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

INDIKATOR KINERJA

1. Tersedianya Prasarana Dasar Perumahan Dan Permukiman Yang Berkualitas Dan Merata

Dalam rangka mendukung kinerja Kepala Dinas untuk sasaran penyediaan prasarana Dasar Perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata berikut indikator kinerja Kepala Bidang PSU :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Indikator ini mencerminkan ketersediaan fasilitas pendukung (seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka) yang menjadi syarat hunian layak, sekaligus menjamin pemerataan kualitas infrastruktur permukiman	(Jumlah satuan perumahan dilengkapi PSU terbangun/Jumlah total perumahan) x 100%	Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perkim

TARGET KINERJA

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	16%	Berdasarkan data perencanaan yang disusun di awal tahun periode penyusunan renstra, disebutkan bahwa jumlah perumahan ada 1.500 lokasi dimana untuk tahun 2025 di rencanakan akan dilakukan pembangunan PSU di 240 Lokasi perumahan, sehingga target PKKepala Dinas untuk Tahun 2025 adalah 16%



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKO PEKANBARU GEDUNG B.6 LANTAI 1
KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU - RIAU

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : SYARIF, S. IP, MM

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : TENGKU AHMED REZA PAHLEVI, S.AP., M.Si.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 05 Desember 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

TENGKU AHMAD REZA PAHLEVI, S.AP., M.Si

Pembina Tk. I / IVb
NIP. 197511102001121010

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN KOTA PEKANBARU

SYARIF, S. IP, MM

Penata Tk. II / III d
NIP. 19800927 201102 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Administrasi Barang Milik daerah sesuai aturan	Cakupan administrasi barang milik daerah sesuai aturan	100 %
2	Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Dok
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok
		Jumlah bahan bacaan perundang - undangan yang disediakan	15 Dok
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok
3	Penyediaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Bulan
		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
		Jumlah tenaga jasa pelayanan umum	1 Laporan
5	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 3.900.000
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.341.680
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 197.793.630
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 63.183.860
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 168.630.000
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 2.225.400
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 442.500.000
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 376.595.618
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 20.524.108
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.500.000
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.143.306.000

13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 47.290.000
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 306.750.000
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 274.400.000
	Total	Rp. 2.881.507.397,00

Pekanbaru, 05 Desember 2025

Atasan Pimpinan Unit Kerja

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

TENGKU AHMAD REZA PAHLEVI, S.AP., M.Si

Pembina Tk. I/ IVb
NIP. 197511102001121010

Pimpinan Unit Kerja

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU

SYARIF, S.IP, MM

Penata Tk.I/ IIId
NIP. 19800927 201102 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKO PEKANBARU GEDUNG B.6 LANTAI 1
KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU - RIAU

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : RONI CHANDRA,ST

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : TENGKU AHMED REZA PAHLEVI, S.AP., M.Si.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

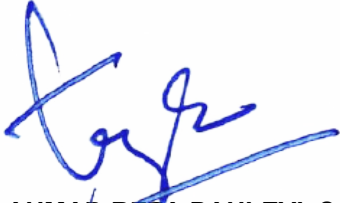
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 05 Desember 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

Pimpinan Unit Kerja
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN KOTA PEKANBARU


TENGKU AHMAD REZA PAHLEVI, S.AP., M.Si

Pembina Tk. I/ IVb
NIP. 197511102001121010


RONI CHANDRA, ST

Penata Tk. I / III d
NIP. 19790705 200701 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dok
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 6.098.080
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.828.250
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.511.701.504
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 1.611.520
TOTAL		Rp 6.521.239.354,00

Atasan Pimpinan Unit Kerja
**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU**

TENGKU AHMAD REZA PAHLEVI, S.AP., M.Si

Pembina Tk. I/ IVb
NIP. 197511102001121010

Pekanbaru, 05 Desember 2025
Pimpinan Unit Kerja
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU**

RONI CANDRA, ST

Penata Tk. I/ III d
NIP. 19790705 200701 1 006